



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

INFORMASI JABATAN
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN.

- Menimbang :**
- a. bahwa adanya perubahan nomenklatur jabatan pelaksana dan penambahan nomenklatur jabatan fungsional pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa Informasi Jabatan perlu ditetapkan dan diterapkan dalam pelaksanaan tugas pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektifitas kerja sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna secara maksimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Informasi Jabatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian / Lembaga Dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INFORMASI JABATAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BANJARMASIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin.

5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin.
6. Informasi Jabatan adalah menginformasikan data-data jabatan, mulai dari struktur organisasi, struktur jabatan, formasi jabatan dan uraian jabatan (job description).
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka suatu susunan organisasi.
8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara / daerah.
9. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

TUJUAN PENETAPAN INFORMASI JABATAN

Pasal 2

Informasi jabatan ditetapkan untuk membantu manajemen dalam upaya pembinaan, penyempurnaan dan penataan di bidang Kelembagaan, Kepegawaian, dan Ketatalaksanaan bagi terselenggaranya tugas umum pemerintahan.

BAB III

PENYUSUNAN INFORMASI JABATAN

Pasal 3

- (1) Penyusunan informasi jabatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta kebutuhan dan kemampuan daerah.
- (2) Informasi jabatan dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Pejabat struktural, pelaksana dan fungsional ditetapkan oleh Walikota atas usulan Sekretaris Daerah sesuai dengan kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 Desember 2019

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

HAM LI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 NOMOR

PETA JABATAN
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

DM. Caws Perdagarsyn clan Perindustrian

Sekretariat Dina Perdagangan dan Perindustrian

KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL
LABATAN

Plan. KanCutee Petassana tankftan
Penera Terampt
Penes *Mahr*
Pennis Penyeka
Pea& AM Pertamina
Peneta ahk Muda

Kepala Sub Bagian Umum dan Reperencanaan

Kepala Sub Bagian Perencanaan

Kepala Sub Bagian Keuangan

JABATAN

Peewusun Kednehan Barang Inventans
Pengelok Pemanfaatan BM(i)
Peng...dr. Umum
Pengadunestrass Kepegawaian

JABATAN

MAN Perencanaan. (yaks. dan Madman
Penadola Program dan Kegiatan
Pengotah Data

JABATAN

flendaNra
Perrusun laporan Keuaregan
Pengekla Cao
Ventilator ele.wkaan

B.dang Penguatan dan Penperencanaan Perdagangan

Wang Kemetrologisan dan Standar. Perdagangan

Kepala edng Pennglutan Swaim Prior Perdagangan dan

Kepala OPueg Peindustrian

Kees. Se. Pembina. Sarana tsetze Pe...pagan

Kap. Seksi Pelayanan Ten dan Tera Wag

Kepi. Se. Pernanaan

I K. Sel. Irklustn Loym, Levan, Mew Dalton. dan Mat
Tresportass

labatan

labatan

Jabran

Andes Perdisoangan

Mules Pelayanan

Maas Parr

Penyukn *Rca. rca* Bentingart Teknes Irdsdsbs

Pe gel. Data

Perepatah Oats Petayanan

Penyusun (faun Ram Penyuketun

Pengelota Produksi

Peripadranstrass unarm

Pengan Data

Ken. Sens Promos* dan Pengembangan Perdagangan

Kepata Se. Pernbruan SDRI Kernetrologun

Kayla Se. Pernehluran dan Pangea..Nan

Kepalis Se. Industn Pertansan, Kan, Tents! don Ineka

Jabatan
Penyusun Rerkana

labatan
Penske Pan.. Kemetrokgsan

Ullman
MAIN Pawn...Gan PAW

Jabatan
Maks Indust..

Pengelola Pameran dan Peragaan

Pengolaq Data

Pengotah Data

renyarsinestrasi Urnun

Kee. Se. Monitoring dan Pengendann Pernollaran
Perusahaan, Barang Beredar dan Handal:n.3

veva. Sens Pengawasan Kernetroktan Nan *StinClarIS. PerdiOngtri*

Kepala Saw Pengekaan

Standansas! dan Penpendahan
Ungkungan

labatan

labatan

labatan

Fasitator Peclngangan

Reny...as Perdagangan Berlang. Kano.

Jabat.
Pawn.. Remain Pawspkatan Nues Pray

Pengawas Inckaai

Penyusun Perkermbangan Hay dan Penigkasan Paso

Peplos Data

Pengefola *Paw*

Pengolah Data

Pena...a Data

Penpadmendexass Urbun

Pens?. Rents.

Key. Una Padua. Tains Daerah Pan.. Pa. Sat.

Keg. Urst Pdadana Tanta Dar. Pelayanan Pasar Sealor !!

WALIKOTA BANJARMASIN.

Kaukbag Tata Usaisa Unit Paaksans Tans Dayah Pelaranan
Prior Sektor I

Kasubbag T. Usaha tint Petaluana Tarn Dxxan Pelayanan Pasar
Seli. **IF**

Penna. Keats=

labatan
Pennis. Rana.

labatan
Pwaph Petra.


HISNU SINA

Peng...mans tartan

labatan
Peng...straw Um urn

labatan
Perwadmrstt Urnun